

Government Capacity of Regional Government of South Solok Regency in Reducing Stunting

Government Capacity Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting

Yulia Fitri ^{1a}, Rahmadani Yusran^{2b(*)}

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^byusranrdy@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author

yusranrdy@fis.unp.ac.id

How to Cite: Fitri & Yusran. (2023). Government Capacity Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting. doi: 10.36526/js.v3i2.

<p>Received : 14-03-2023 Revised : 30-06-2023 Accepted: 13-08-2023 Keywords: Government Capacity, Stunting, Kabupaten Solok Selatan</p>	<p>Abstract This study analyzes government capacity or the ability of local governments to reduce stunting in South Solok Regency using descriptive qualitative methods. This research was conducted in the Regional Government of South Solok Regency. For informants who were selected purposively by obtaining from government capacity the local government has not been optimally implemented, this is because there are problems faced by the Regional Government, namely the special APBD budget for handling stunting does not exist, the special budget for stunting comes from the central budget and the implementation budget is limited, not optimal coordinating between OPDs, in carrying out holistic and integrative education programs the Education Office is carrying out activities going well. The problem faced is that the understanding of PAUD teachers is sometimes not conveyed to children in the field, so the training is not carried out in accordance with applicable policies, and the cadres at the Posyandu do not receive Posyandu cadre training.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam hidup mereka, dengan batas z-score -2 standar deviasi. Prevalensi stunting di Indonesia menurut hasil riset oleh Kemenkes melalui hasil Kesehatan Dasar (Riskandes) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting belita tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu mulai tahun 2013 sampai 2018. Dalam hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013 sekitar 37,2% belita yang menderita stunting, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan sehingga yang menderita stunting berada pada angka 30,8% pada bayi belita.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 1 menyatakan bahwa penurunan stunting akan dicapai melalui upaya yang mencakup intervensi khusus dan sensitif yang konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Strategi nasional percepatan penurunan stunting terdiri dari lima (lima) pilar dan berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target prevalensi stunting nasional, yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Tujuan strategi ini adalah sebagai berikut: 1) mengurangi prevalensi stunting; 2) meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga; 3) memastikan pemenuhan asupan gizi; 4) meningkatkan pola asuh; 5) meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan; dan 6) meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Kabupaten Solok Selatan saat ini berada pada posisi ke-4 di Provinsi Sumatera Barat dengan kasus penderitaan stunting terbanyak setelah kepulauan Mentawai, Pasaman, dan Kabupaten Solok (Kemenkes, 2019). Berdasarkan indeks TB/U terhadap Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 tercatat angka tertinggi penderitaan stunting yaitu 13,7% lebih tinggi dari pada tahun 2019 yaitu 8,7%. Hal ini perlu perhatian yang mendalam terhadap penurunan stunting. Menanggulangi masalah stunting perlu tindakan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan intervensi gizi. Sebagai bentuk dukungan dari daerah, seharusnya ada peraturan yang mengatur lebih mendalam mengenai pembangunan jangka menengah nasional termasuk didalamnya program khusus untuk dapat mengatasi stunting yang terjadi. Dalam proses penanganan stunting pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama atau kolaborasi dilakukan untuk dapat memastikan penurunan stunting dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pemerintah daerah belum berhasil dalam menurunkan prevalensi stunting.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting berkaitan erat dengan kapasitas pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, kapasitas pemerintahan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari pengembangan kapasitas pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode dan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan metode triangulasi, yaitu data yang didapatkan dibandingkan dengan berbagai sumber dan teknik yang berbeda. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan belum mampu dalam menurunkan prevalensi stunting, meskipun dalam menurunkan angka stunting telah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan gizi buruk selama ini belum berhasil dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah koordinasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting belum maksimal (Febrian & Yusran, 2021).

Merujuk pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, kasus stunting saat ini masih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dilihat dari tahun 2018 sebesar 16,45%. Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 8,7%. Sedangkan pada tahun 2020 kasus stunting mengalami kenaikan lagi sebesar 13,7%. Berdasarkan temuan penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan bahwa stunting pada tahun 2021 terjadi kenaikan di dua daerah, yaitu Lubuk Ulang Aling dan Abai (lihat tabel 1).

Tabel 1. Data stunting berdasarkan laporan penimbangan massal Pukesmas di Kabupaten Solok Selatan tahun 2021

No	Kecamatan	Pukesmas	Belita Stunting
----	-----------	----------	-----------------

			Diukur TB	Stunting	%
1.	KPGD	Sungai Kalu	913	12	1.31
2.	KPGD	Pakan Rabaa	1038	68	6.55
3.	Sungai Pagu	Muara Labuh	2303	194	8.42
4.	Pauh Duo	Pakan Selasa	1318	100	1.59
5.	Sangir	Lubuk Gadang	3476	37	1.06
6.	Sangir Jujuan	Bidar Alam	1021	104	30.19
7.	Sangir Balai Janggo	Mercu	627	55	6.77
8.	Sangir Balai Janggo	Talunan	529	33	6.24
9.	Sangir Batang Hari	Abai	752	102	13.56
10.	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling	166	34	20.48
Jumlah (Kab/Kota)			12.143	739	6.09

Berdasarkan data stunting di atas, dapat dilihat bahwa kasus stunting masih tinggi di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Solok Selatan oleh karena itu, perlu kemampuan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung untuk menurunkan prevalensi stunting agar tercapainya kebijakan yang sudah ditetapkan. Government capacity pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting sebagai berikut :

Pertama, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran penurunan stunting. Dalam penyediaan anggaran penurunan stunting, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan telah menyediakan anggaran untuk melaksanakan program-program penurunan stunting. Anggaran untuk penurunan stunting berasal dari dana pusat. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program penurunan stunting di daerah. Sehingga, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran penurunan stunting sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 75 Tahun 2022 pasal 5 terkait pembiayaan dalam penurunan stunting.

Kedua, kemampuan pemerintah daerah mengkoordinasi dan kerjasama dalam program penurunan stunting. Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting telah membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang melibatkan Bapedda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP2KB PP & PA, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian.

Ketiga, kemampuan pemerintah daerah melaksanakan pendidikan yang holistik dan integratif dalam penurunan stunting. Pendidikan yang holistik dan integratif merupakan pendidikan untuk melakukan penanganan anak usia dini secara utuh yang mencakup pelayanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan yang berguna untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu program yang berkaitan dengan pendidikan yang holistik dan integratif adalah Program pelatihan guru paud yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan yang bertujuan untuk menjadikan guru sebagai perantara menyampaikan kepada anak-anak bahwa pentingnya pemenuhan gizi, seperti melakukan sarapan di pagi hari dan pelatihan tersebut diberikan untuk pemahaman kepada guru Paud itu sendiri bahwa pentingnya menjaga pola makan serta pemenuhan gizi bagi tubuh. Program pelatihan ini sudah menjadi kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

Keempat, kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program sanitasi dan air minum berbasis masyarakat untuk penurunan stunting. Program sanitasi dan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS). PAMSIMAS merupakan program pembangunan sanitasi dan air minum perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan telah melakukan program pembangunan sanitasi dan penyediaan air minum ini di setiap daerah-daerah yang ada di Kabupaten Solok Selatan. dalam pelaksanaan program sanitasi dan penyediaan air minum berbasis masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk pencegahan terjadinya stunting. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam program sanitasi dan air

minum berbasis masyarakat telah dilakukan oleh Dinas PU yang dilaksanakan di daerah yang membutuhkan sanitasi dan penyediaan air minum di Kabupaten Solok Selatan.

Kelima, kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program pemanfaatan perkarangan rumah tangga dan pemberian bibit ikan untuk penurunan stunting. Pemanfaatan perkarangan rumah tangga sebagai sumber gizi keluarga yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan perkarangan rumah tangga dilakukan dengan menanam sayuran-sayuran. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan perkarangannya dengan cara menanam sayuran yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang bergizi. Pemanfaatan perkarangan rumah tangga dan pemberian bibit ikan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, ketahanan pangan dan perikanan sudah dilaksanakan untuk membantu menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Solok Selatan.

Keenam, kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program intervensi spesifik untuk penurunan stunting. Program intervensi spesifik ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Dalam program tersebut ada beberapa kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan program intervensi spesifik. Program intervensi dilakukan untuk menurunkan stunting. kemampuan pemerintah daerah dalam program imunisasi sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelaksanaan program tersebut dilakukan lewat kader-kader posyandu yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

Pembahasan

Menurut pandangan Polidano dalam Nuhgroho (2014) menyatakan bahwa dalam kapasitas pemerintah daerah perlu adanya Policy capacity, Implementation authority, dan Operational efficiency. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan belum mampu dalam menurunkan prevalensi stunting, meskipun dalam menurunkan angka stunting telah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan permasalahan government capacity pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting sebagai berikut :

Pertama, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Solok Selatan sudah mampu dilakukan. namun, masih ditemui permasalahan untuk pelaksanaan program-program penurunan stunting bahwa tidak ada anggaran APBD untuk penanganan stunting, anggaran khusus stunting berasal dari anggaran pusat. Pada tahun 2022 anggaran untuk stunting berada di Bapedda. Namun, untuk tahun 2023 anggaran khusus stunting berada di DP2KB PP & PA. Berdasarkan data anggaran stunting dari Dinas BAPEDA Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 3.775.149.298. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) OPD, yaitu Dinas Kesehatan Dinas P2KBPP&PA dan Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan. Pada tahun 2022 hasil rekapitulasi anggaran yang telah dikeluarkan untuk penurunan stunting oleh 6 (enam) OPD sebesar Rp. 16.984.496.457 (Rekap Anggaran Kegiatan Stunting BAPEDA Solok Selatan 2021-2022). Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk penurunan stunting. Setiap OPD-OPD yang bertanggungjawab memberikan kebutuhan kepada penderita stunting, namun tidak dilakukan secara menyeluruh sekedar memberikan apa yang sangat dibutuhkan saja.

Kedua, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanganan stunting, OPD-OPD yang ikut terlibat dalam percepatan penurunan stunting sudah melakukan koordinasi, namun koordinasi belum optimal dilakukan antar OPD. Koordinasi untuk pelaksanaan program stunting baru mulai berjalan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 tersebut angka stunting mengalami kenaikan di Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan dalam melakukan koordinasi karena sebagian dari OPD pengampu percepatan penurunan stunting masih kurang paham akan stunting dan lambatnya respon dari OPD-OPD pengampu yang menyebabkan miskomunikasi akan pelaksanaan program penanganan stunting.

Ketiga, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pendidikan yang holistik dan integratif Dinas Pendidikan sudah mampu dilakukan. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah pemahaman guru Paud yang kadang tidak tersampaikan kepada anak-anak dilapangan membuat pelatihan yang dilakukan tidak terlaksana sesuai dengan kebijakan berlaku.

Keempat, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program sanitasi dan air minum berbasis masyarakat sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Untuk melakukan program tersebut Dinas Pekerjaan Umum berupaya melaksanakan program sesuai dengan tanggungjawabnya untuk membangun sanitasi dan air minum berbasis masyarakat di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Solok Selatan, akan tetapi pelaksanaan sanitasi dan air minum tersebut hambatan yaitu anggaran yang terbatas dalam pembangunan sanitasi dan air minum menyebabkan lambatnya pelaksanaan program dilakukan.

Kelima, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemanfaatan perkarangan rumah tangga dan pemberian bibit ikan sudah mampu dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi adalah kesediaan anggaran APBD yang terbatas menyebabkan lambatnya pelaksanaan program untuk penurunan stunting.

Keenam, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program intervensi spesifik sudah mampu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan dilakukan di posyandu-posyandu yang ada di seluruh daerah-daerah di Kabupaten Solok Selatan. Pelaksanaan dan pemberian obat penambah darah, pemeriksaan kadr HB, konseling gizi, kimunisasi dan lain sebagainya dilakukan di posyandu. Dalam pelaksanaan program intervensi spesifik terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu kader-kader yang ada di posyandu kurang mendapatkan pelatihan kader posyandu, sehingga ini menyebabkan kurangnya kemampuan kader melaksanakan program di posyandu.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai government capacity pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting dapat diambil kesimpulan bahwa government capacity pemerintah daerah belum optimal dilakukan karena masih ditemui permasalahan, yaitu anggaran APBD khusus untuk penanganan stunting tidak ada, belum optimal melakukan koordinasi antar OPD, belum maksimal dalam melaksanakan program pendidikan yang holistik dan integratif dan kader-kader yang ada di posyandu kurang mendapatkan pelatihan kader posyandu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan komitmen bersama untuk saling membantu dan menjadikan permasalahan sebagai program yang prioritas karena tingginya angka stunting di Kabupaten Solok Selatan yang cukup tinggi, peningkatan koordinasi antar OPD dan peningkatan kesadaran pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan program penurunan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariati, L. I. P. (2019). Faktor-faktor resiko penyebab terjadinya stunting pada balita usia 23-59 bulan. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 6(1), 28-37.
- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 168.
- ASRI, N. (2022). *Kapasitas Pemerintah Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD)*.
- Erawaty, T. (2018). *Capacity Building Organisasi (Studi Pada Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung (Doctoral dissertation, Tesis).

- Febrian F & Yusran R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di kota padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3 (1), 11-21.
- Joko Subagyo, P. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,)*, Jakarta: PT. Indeks.(Bahasa Inggris, Boston: Pearson Education, Inc., Publishing as Allyn & Bacon (Imprint of Pearson).
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 225-229.
- Riskesdas, K. (2018). Hasil utama riset kesehata dasar (RISKESDAS). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1-200.
- Sari, N. (2014). Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).